
**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN ANGGARAN: MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK**

***PUBLIC PARTICIPATION IN BUDGET PLANNING: IMPROVING
ACCOUNTABILITY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC FUND USE***

Audry Maulidia¹, Lisha Rosmalia²

Administrasi Negara, Universitas Pamulang Serang^{1,2}
email : odiebiess0@gmail.com¹, lisharosmalia99@gmail.com²

Accepted: Dec, 28th 2025 Published: Dec, 30th 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pentingnya peran partisipasi publik dalam perencanaan anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Latar belakang masalah muncul dari banyaknya kasus penyelewengan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan menuntut transparansi yang lebih baik. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka yang menganalisis buku dan jurnal terkait, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keterlibatan aktif masyarakat, seperti melalui survei, forum komunitas, dan platform daring, dapat memperkuat alokasi anggaran, legitimasi kebijakan, serta pengawasan dana publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran saat partisipasi publik berjalan baik, meskipun tantangan seperti keterbatasan akses informasi, kesenjangan sosial ekonomi, dan tekanan terhadap partisipan masih menjadi hambatan. Maka dari itu, kualitas partisipasi masyarakat yang inklusif serta dukungan kelembagaan merupakan kunci utama untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik di tingkat daerah, sehingga dibutuhkan kebijakan dan pelatihan yang mendukung terciptanya partisipasi yang bermakna dan efektif.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dana Publik, Anggaran

ABSTRACT

This study examines the importance of public participation in budget planning as an effort to improve accountability and effectiveness in the use of public funds. The background of the problem arises from numerous cases of misappropriation and inefficiency in fund management, which have led to public dissatisfaction and demands for greater transparency. Using qualitative methods through a literature review analyzing relevant books and journals, this study explores how active public involvement, such as through surveys, community forums, and online platforms, can strengthen budget allocation, policy legitimacy, and oversight of public funds. The results show significant improvements in budget management when public participation is effective, although challenges such as limited access to information, socioeconomic disparities, and pressure on participants remain obstacles. Therefore, the quality of inclusive public participation and institutional support are key to achieving transparency, accountability, and effectiveness in the use of public funds at the regional level. Therefore, policies and training that support meaningful and effective participation are needed.

Keyword : Public Participation, Accountability, Public Funds, Budget

A. Pendahuluan

Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Menurut (Setya Nanda Anggela Putri, 2023) partisipasi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, yang menunjukkan bahwa partisipasi melibatkan inisiatif dan penggunaan kebebasan masyarakat untuk berkontribusi. Penelitian ini mengangkat peranan penting keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Menurut (Utari Wulandari & H. Jhon Simon, 2019) efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana keberhasilan ini diukur dari seberapa baik organisasi mencapai tujuannya. Fenomena seringnya terjadi penyelewengan, ketidakefisienan, dan pemborosan dalam pengelolaan dana publik menjadi perhatian utama, mengingat dana tersebut merupakan kepercayaan masyarakat yang harus dikelola transparan dan bertanggung jawab demi pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup sebagai prasyarat keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik (Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008, n.d.). Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan dana publik secara transparan, akuntabel, dan efektif, yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003, n.d.). Melalui mekanisme partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap perencanaan anggaran, seperti survei, forum komunitas, dan platform daring, transparansi serta legitimasi kebijakan dapat diperbaiki, sementara pengawasan publik terhadap penggunaan dana menjadi lebih kuat. Akuntabilitas disini merujuk pada kewajiban pemerintah dalam mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kebijakan secara terbuka, dan efektivitas diartikan sebagai tercapainya tujuan dengan cara yang efisien dan sesuai target.

Teori partisipasi publik yang mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan anggaran publik. Teori ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat sebagai aktor yang dapat memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas (Anissa Nur Silvia & Rita Myrna, 2023; Nurakhmadi et al., 2024). Partisipasi publik tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus bermakna dan inklusif agar aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam kebijakan anggaran yang responsif. Konsep akuntabilitas publik juga menjadi landasan teori, yang menjelaskan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Akuntabilitas ini terbentuk melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sehingga

muncul legitimasi sosial dan k(Febriani & Paselle, 2019)ntah (Febriani & Paselle, 2019). Efektivitas pengelolaan dana publik dijelaskan dengan mengacu pada kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal, efisien, dan tepat waktu dengan sumber daya yang tersedia, yang didukung oleh perencanaan anggaran yang matang dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan (Samburoto et al., 2024; Yulisfan, 2023).

Teori *good governance* juga digunakan untuk menggarisbawahi nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori ini menuntut peran aktif publik dalam berbagai tahapan pengelolaan anggaran agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Hambatan dalam partisipasi masyarakat juga dibahas dengan merujuk pada faktor-faktor sosial-ekonomi, akses informasi, dan dinamika budaya yang mempengaruhi kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut (Nelly, 2024).

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, serta memperkuat legitimasi sosial kebijakan yang diambil. Selain itu, perencanaan yang matang dengan penggunaan sumber daya secara optimal menjadi syarat utama dalam mewujudkan pengelolaan dana publik yang efektif. Terdapat berbagai hambatan dalam mewujudkan partisipasi yang inklusif dan bermakna, seperti keterbatasan akses informasi, kesenjangan sosial-ekonomi, serta adanya tekanan dan intimidasi terhadap pelaku partisipasi.

Penelitian ini berfokus pada peran partisipasi publik dalam perencanaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum menyoroti pengawasan atau pelaksanaan dana. Penelitian ini penting karena mengkaji secara mendalam hambatan-hambatan signifikan seperti akses informasi yang tidak merata, kesenjangan social ekonomi, dan tekanan terhadap peserta partisipasi yang sering terabaikan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan anggaran mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya agar dapat diatasi dengan solusi yang efektif. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang berbasis *good governance* dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik dan bagaimana hal

ini dapat berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik melalui Studi Pustaka. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber informasi seperti buku dan jurnal. Selain itu, penulis juga memerlukan analisis agar menghasilkan informasi yang valid. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka memberikan wawasan yang luas dan mendalam peran masyarakat dalam perencanaan anggaran publik dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informasi yang valid dari beberapa jurnal untuk memperkuat isi dari penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan data non-numerik karena menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang digunakan oleh penulis pertama-tama mencari informasi mengenai pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dari beberapa sumber dan jurnal yang sudah ada, kemudian penulis memperdalam jawaban yang sudah ditemukan dari beberapa jurnal yang penulis dapatkan. Tujuan penulis mencari informasi dari beberapa sumber jurnal adalah untuk menganalisis semua jawaban yang sudah penulis temukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari beberapa jurnal yang sudah penulis temukan, akhirnya penulis bisa menganalisis dan memperdalam jawaban dari informasi yang sudah penulis temukan.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik

Dari jurnal ke-1 ditulis oleh (Nurakhmadi et al., 2024) yang berjudul “Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran” menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bentuk proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran melibatkan pengumpulan berbagai masukan dari masyarakat melalui survei, pertemuan komunitas, atau platform daring. Saran ini kemudian diproses dan dimasukkan ke dalam rancangan kebijakan anggaran. Melalui konsultasi publik dan forum diskusi, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah, menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran, serta membahas isu-isu anggaran secara lebih mendalam. Hasil partisipasi masyarakat ini akan menjadi komponen penting dalam penyusunan kebijakan anggaran, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar diperhatikan. Sehingga, partisipasi yang efektif akan menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan dan mempererat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dari jurnal ke-2 ditulis oleh (Anissa Nur Silvia & Rita Myrna, 2023) yang berjudul “Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi” menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah komponen penting yang tidak boleh terabaikan dalam suatu proses perencanaan

anggaran dana publik. Karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Partisipasi ini menjadi landasan yang mendorong transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat ini mengutamakan prinsip demokrasi dasar. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memahami dan ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana publik yang asalnya dari pajak yang mereka kontribusikan.

Melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran, pemerintah mampu menghubungkan jarak antara pihak pemerintah dengan masyarakat, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Kedua, partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Saat masyarakat dapat memahami penggunaan dana publik, peluang terjadinya korupsi menjadi lebih kecil. Keterlibatan partisipasi masyarakat juga memungkinkan peran pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah dalam mengawasi dan menunjukkan potensi penyalahgunaan dalam penggunaan dana publik.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan legitimasi sosial bagi pemerintah. Saat masyarakat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah menjadi lebih sah dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, lalu terciptanya kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah mendapat dukungan yang lebih luas dari publik. Keterlibatan masyarakat membantu pemerintah untuk mengenali keutamaan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat adalah kunci utama untuk menjadikan proses perencanaan anggaran publik lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan dana publik.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik

Dari jurnal ke-3 ditulis oleh (Samburoto et al., 2024) yang berjudul “Strategi efektif optimalisasi penggunaan dana publik” menyebutkan bahwa pemanfaatan dana publik yang efektif artinya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Efisien artinya menyelesaikan tugas menggunakan cara yang paling baik agar hasilnya maksimal, sedangkan efektif berarti mampu mencapai tujuan secara tepat dan sesuai target tujuannya. Kriteria utama pelaksanaan yang efisien dan efektif adalah memiliki tujuan yang jelas dan ternilai. Tujuan yang jelas mempermudah dalam merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuannya. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar bisa menentukan keutamaan pekerjaan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan, serta durasi penyelesaian tugas. Selain itu, sumber daya harus digunakan

secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Singkatnya, efektivitas penggunaan dana publik adalah kemampuan pemerintah memaksimalkan dana yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan hasil yang terbaik.

Dari jurnal ke-4 ditulis oleh (Yulisan, 2023) yang berjudul “Pengabdian masyarakat multi disiplin ilmu efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dalam menganalisis laporan keuangan publik” menyebutkan bahwa dari hasil penelitian, terlihat bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan yang mendalam, pengelola dana publik dapat mengidentifikasi area-area yang masih kurang efisien dan mencari cara perbaikan. Selain itu, transparansi dalam pelaporan penggunaan dana juga semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau instansi yang mengelola dana. Teknologi juga berperan besar dalam mempermudah proses analisis keuangan. Dengan bantuan perangkat lunak dan sistem digital, data keuangan bisa dianalisis lebih cepat dan akurat, serta membantu menemukan pola atau masalah yang mungkin terlewat. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam pengelolaan dana publik.

Selain itu, pelatihan dan peningkatan kemampuan pihak-pihak yang berpengaruh dalam memahami laporan keuangan juga sangat dibutuhkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka bisa lebih cermat dalam mengelola dana dan memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang benar dan memberikan hasil yang nyata. Ketika efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana berhasil ditingkatkan, dampaknya langsung terasa pada kualitas pelayanan publik. Dengan dana yang sama, pelayanan yang diberikan bisa lebih banyak, lebih cepat, atau lebih baik. Hal ini pasti sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan tersebut. Namun, tantangan dalam pengelolaan dana publik tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan agar pengelolaan dana terus membaik seiring waktu. Keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak terkait juga penting agar pengawasan dan akuntabilitas tetap berjalan dengan baik.

Tantangan dan Hambatan dalam Partisipasi Publik

Dari jurnal ke-5 ditulis oleh (Nelly, 2024) yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik” menyebutkan bahwa Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang relevan, sehingga banyak anggota masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara efektif. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan serius, di mana kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas mengalami keterbatasan dalam mengakses ruang partisipasi, yang pada gilirannya memperbesar ketimpangan pengaruh dan keterwakilan.

Selain itu, nilai dan norma budaya yang beragam dapat memengaruhi cara individu dan kelompok dalam berpartisipasi, menciptakan perbedaan dalam tingkat keterlibatan. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah ancaman dan penindasan terhadap aktivis dan kelompok yang ingin berperan aktif, yang menyebabkan ketakutan akan risiko seperti intimidasi atau tindakan represif, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi yang bebas dan aktif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain guna menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi yang inklusif, demokratis, dan bersifat nyata dalam proses kebijakan publik.

Dalam pembahasan ini menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik memengaruhi akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik di tingkat daerah. Pertanyaan utama yang dibahas dalam pembahasan ini adalah sejauh mana keterlibatan warga melalui survei, forum komunitas, dan platform daring dapat meningkatkan transparansi penyusunan anggaran serta bagaimana masukan publik terealisasi menjadi kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, mengevaluasi dampak partisipasi terhadap akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan kinerja, keterlibatan publik dalam konsultasi anggaran, dan kemampuan komunitas untuk mengawasi penyalahgunaan dana. Serta, akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi, seperti ketersediaan informasi anggaran, inklusivitas partisipasi lintas kelompok sosial, serta hubungan antara pemerintah daerah dan warga. Selanjutnya, fokus dari pembahasan ini adalah bagaimana masukan publik yang terintegrasi secara efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, dengan menyoroti perancangan anggaran yang lebih tepat sasaran, penggunaan sumber daya yang optimal, serta peningkatan kualitas layanan publik. Akhirnya, dalam pembahasan ini membahas hambatan-hambatan yang mungkin muncul, misalnya keterbatasan akses informasi, kendala budaya partisipasi, dan risiko tekanan terhadap aktor-aktor partisipatif, beserta solusi kebijakan yang realistis untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik dalam perencanaan anggaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai mekanisme seperti survei, forum komunitas, dan platform daring, transparansi dalam penyusunan anggaran dapat meningkat, sehingga pengawasan publik terhadap penggunaan dana menjadi lebih kuat dan anggaran menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan signifikan, termasuk keterbatasan akses informasi, kesenjangan sosial ekonomi, dan tekanan terhadap individu yang berpartisipasi, yang dapat menghambat kualitas partisipasi tersebut. Oleh karena itu,

kualitas partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik di tingkat daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang memastikan akses informasi publik yang merata guna memperluas peluang partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi masyarakat serta pemangku kepentingan agar proses partisipasi dapat berjalan secara efektif dan bermakna. Pengembangan forum partisipatif yang inklusif dan pemanfaatan teknologi digital harus terus didorong untuk mengatasi kendala akses dan hambatan sosial ekonomi. Terakhir, penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk menggali lebih dalam model partisipasi yang efektif dalam konteks digital serta strategi untuk mengatasi intimidasi atau tekanan terhadap peserta partisipasi agar tercipta lingkungan yang kondusif dan aman bagi keterlibatan publik.

E. Referensi

- Anissa Nur Silvia, & Rita Myrna. (2023). Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan dana publik
- Febriani, R., & Paselle, E. (2019). Akuntabilitas publik dalam pelayanan administrasi di kantor kelurahan pelita kecamatan samarinda ilir kota samarinda. *In eJournal Administrasi Negara (Vol. 7, Issue 3)*.
- Nelly, S. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik*. 6(1).
- Nurakhmadi, et al (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48–62.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Samburoto, et al (2024). Strategi efektif optimalisasi penggunaan dana publik.
<https://mahandia.com/jurnal/index.php/jm/index>
- Setya Nanda Anggela Putri. (2023). Pengaruh motivasi dan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan desa sendangrejo kabupaten lamongan.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Undang-Undang Republik indonesia no 14 tahun 2008. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia no 17 tahun 2003. (n.d.).
- Utari Wulandari, & H. Jhon Simon. (2019). Pengaruh efektivitas kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di kelurahan sidorame barat 1 kecamatan medan perjuangan.
- Yulisfan. (2023). Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Dalam Menganalisis Laporan Keuangan Publik.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi>